LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		xiv
BAB I	**PENDAHULUAN**	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Maksud dan Tujuan	I-2
1.3	Landasan Hukum	I-3
1.4	Sistematika Penulisan	I-9
BAB II	**KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**	II-1
2.1	Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	II-1
2.2	Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	II-2
2.3	Hambatan dan Tantangan	II-5
2.4	Penanganan Pengaduan Masyarakat	II-5
2.5	Monitoring dan Evaluasi	II-5
BAB III	**CAPAIAN DAN ANALISIS**	III-1
3.1	Program Penanggulangan Kemiskinan	III-1
3.2	Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan	III-1
BAB IV	**RENCANA TINDAK LANJUT**	IV-1
BAB V	**PENUTUP**	V-1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1	Jumlah Penduduk Miskin Kabupten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	III-2
Tabel	3.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2023	III-3
Tabel	3.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalsel Tahun 2010 - 2023	III-5
Tabel	3.4	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel Tahun 2023	III-8
Tabel	3.5	Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2023	III-9
Tabel	3.6	Perbandingan Perkembangan Persentase Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2011 - 2023	III-11
Tabel	3.7	Indeks Kedalamam Kemiskinan Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel Tahun 2023	III-13
Tabel	3.8	Perkembangan Indeks Kedalamam Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2023	III-15
Tabel	3.9	Perbandingan Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2010 - 2023	III-17
Tabel	3.10	Capaian indeks keparahan kemiskinan (P2)Kabupaten/Kota di Prov.Kalel tahun 2023	III-18
Tabel	3.11	Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2010-2023	III-20

Tabel	3.12	Perbandingan perkembangan capaian indeks keparahan kemiskinan antar tingkat pemerintahan	III-21
Tabel	3.13	Perbandingan garis kemiskinan kabupaten/kota di Prov.Kalsel	III-24
Tabel	3.14	Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010 – 2023	III-26
Tabel	3.15	Perbandingan Perkembangan Garis Kemiskinan Antar Tingkat Pemerintahan Tahun 2013 - 2023	III-27
Tabel	3.16	Perbandingan indeks gini kabupaten/kota di Prov.Kalsel	III-29
Tabel	3.17	Perkembangan indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010 – 2023	III-30
Tabel	3.18	Perkembangan Indeks Gini Antar Tingkat Pemerintahan Tahun 2010 – 2023	III-32
Tabel	3.19	Perkembangan DTKS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2023	III-33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1	Grafik Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bandingkan dengan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	III-2
Gambar	3.2	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2023	III-4
Gambar	3.3	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2023	III-5
Gambar	3.4	Grafik Relevansi Perkembangan Persenatse Penurunan/Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2023	III-7
Gambar	3.5	Grafik Posisi Relatif Persentase Penduduk MiskinKab./Kota di Prov. Kalsel Tahun 2023	III-8
Gambar	3.6	Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2023	III-10
Gambar	3.7	Grafik Perbandingan Perkembangan Persentase Kemiskinan Kab. HST, Prov. Kalsel dan Nasional Tahun 2011 – 2023	III-12
Gambar	3.8	Grafik Perbandingan Perkembangan Persentase Penurunan/Peningkatan Persentase Kemiskinan Kab. HST, Prov. Kalsel dan Nasional Tahun 2011 - 2023	III-13
Gambar	3.9	Grafik Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	III-14

Gambar	3.10	Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 – 2023	III-16
Gambar	3.11	Grafik Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Antar Tingkat Pemerintahan Tahun 2010 - 2023	III-18
Gambar	3.12	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten / Kota di Prov. Kalsel Tahun 2023	III-19
Gambar	3.13	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2023	III-21
Gambar	3.14	Grafik Perbandingan Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. HST, Prov. Kalsel dan Nasional Tahun 2010 - 2023	III-22
Gambar	3.15	Grafik Relevansi Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. HST, Prov. Kalsel dan Nasional Tahun 2010 - 2023	III-23
Gambar	3.16	Grafik Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel Tahun 2023	III-25
Gambar	3.17	Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2023	III-26
Gambar	3.18	Grafik Perbandingan Perkembangan Garis Kemiskinan Antar Tingkat Pemerintahan Tahun 2013 - 2023	III-28
Gambar	3.19	Grafik Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel Tahun 2023	III-29
Gambar	3.20	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2023	III-31
Gambar	3.21	Grafik Perkembangan Indeks Gini Antar Tingkat Pemerintahan Tahun 2010 - 2023	III-32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara lebih konkrit amanat penanggulangan kemiskinan tersebut tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yaitu : Pasal 27 ayat 2; Pasal 28 Huruf A; Pasal 28 Huruf B ayat 2; Pasal 28 Huruf C ayat 1 dan 2; Pasal 28 Huruf D ayat 2; Pasal 28 Huruf H ayat 1 dan 3; Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4; serta Pasal 34 ayat 1, 2,3, dan ayat 4.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibentuk kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 050.13/49/050.13/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tugas dan fungsi Tim diantaranya adalah adalah membuat Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Laporan ini sangat strategis sebagai instumen dalam upaya memberikan gambaran capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Selain itu laporan ini juga sebagai instrumen evaluasi dalam rangka perbaikan implementasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dimaksudkan untuk menjelaskan perkembangan pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun tujuan disusunnya LP2KD Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan gambaran kondisi kemiskinan daerah
2. Memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
3. Memberikan gambaran kinerja TKPKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah selama tahun 2024

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LP2KD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negarai Republik Indonesia Nomor 6485);

27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkup Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–2025;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026;
45. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026;
46. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 050.13/49/050.13/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Uraian singkat tentang latar belakang penyusunan LP2KD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.

Uraian yang menjelaskan data-data terkait anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB III CAPAIAN DAN ANALISIS.

Uraian yang menjelaskan program penanggulangan kemiskinan daerah dan capaian kinerja hasil pelaksanaan program yang telah disusun, serta capaian kinerja kemiskinan akhir tahun yang meliputi jumlah dan persentase kemiskinan, gambaran indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan.

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

Uraian tentang informasi dan penjelasan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

BAB V PENUTUP

Uraian tentang kesimpulan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB II
KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2. 1. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan membentuk kelembagaan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan amanat tersebut maka Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 050.13/49/050.13/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. TKPK mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Sedangkan fungsi dari TKPK Kabupaten adalah: (a) penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota; (b) koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten/Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan; (c) koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan; (d) fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan; (e) penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; (f) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan (g)

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. Dalam kelembagaan TKPK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ketua TKPK adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah.

2. 2. Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2024 sesuai kelompok program adalah sebagai berikut.

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu
   - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
     - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp.40.000.000.000,00
   - Program Rehabilitasi Sosial
     - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan Anggaran Rp 1.901.250.000,00
   - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
     - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha dengan anggaran Rp. 8.115.775.600,00
   - Program Kawasan Permukiman
     - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran Rp 2.095.859.900,00
     - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan anggaran Rp. 4.237.159.000,00

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dengan anggaran Rp 2.483.739.900,00
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran Rp. 8.512.229.700,00

- Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
  Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kewenangan Kabupaten dengan anggaran Rp. 17.056.800,00

- Program Pencatatan Sipil
  - Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
    Rp 299.901.100,00
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan
  - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
    Rp 830.970,00

- BAZNAZ Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
  - Pendataan Fakir Miskin Setiap Kecamatan dengan anggran Rp. 69.000.000,00

- Program Pengelolaan Pendidikan
  - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan anggran 500.000.000.00
  - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menegah Pertama dengan anggran 100.000.000.00

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp 701.976.000,00

3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil dengan anggaran Rp 156.000.000,00
  - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Kota dengan anggaran Rp 1.911.500,00

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan anggaran Rp 3.063.000.000,00
  - Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian dengan anggaran Rp. 1.877.527.000,00
- Program Penyuluhan Pertanian
  - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa dengan anggaran Rp 231.322.000,00

Kelembagaan yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu pemerintah kabupaten melalui 10 perangkat daerah , dan 1 lembaga swasta alokasi anggaran mencapai Rp. 94.144.010.800,00

2. 3. Hambatan dan Tantangan

Hambatan dalam pelaksanaan program adalah

a. Belum tersosialisasikannya data kemiskinan.
b. Belum adanya komitmen penggunaan data kemiskinan sebagai rujukan pelaksanaan program dan kegiatan
c. Belum optimalnya koordinasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi
d. Belum adanya sinergitas lokasi dan wilayah

Tantangan yang dihadapi adalah

a. Pendataan kemiskinan yang masih belum baik, sehingga data belum akurat
b. Data kemiskinan yang selalu berkembang
c. Komitmen dan sinergitas.

2. 4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pada tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum dibentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Sedang pengaduan masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui pesan singkat, atau website www.lapor.go.id dan melalui aplikasi AndroidSP4N lapor tidak ada.

2. 5. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terlaksana dengan baik. Kunjungan lapangan masih dilakukan parsial. Rapat evaluasi pelaksanaan program yang melibatkan seluruh sebagian dan seluruh anggota Tim dan Pokja TKPK.

BAB III
CAPAIAN DAN ANALISIS

3. 1. Program Penanggulangan Kemiskinan

Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat tabel 3.1 pada lampiran.

3. 2. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

3.2.1. Capaian Kinerja dan Anggaran

Capaian kinerja dan realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 pada lampiran. Realisasi intervensi program pemerintah pusat (APBN) untuk pengentasan kemiskinan tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel 3.3 pada lampiran.

3.2.2. Capaian Indikator Kemiskinan Konsumsi

Capaian Indikator Kemiskinan Konsumsi meliputi indikator jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), garis kemiskinan dan indeks gini.

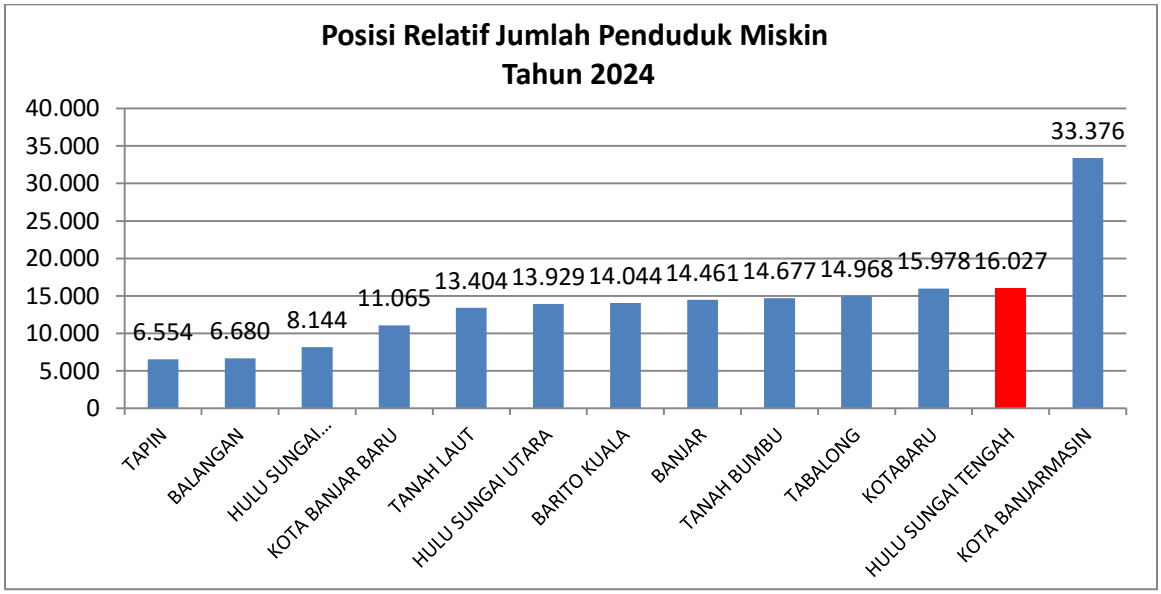
A. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 sebanyak 16.027 jiwa. Posisi relatif penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah berada pada urutan ke-12 terbanyak dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)
1	TAPIN	6.554
2	BALANGAN	6.680
3	HULU SUNGAI SELATAN	8.144
4	KOTA BANJAR BARU	11.065
5	TANAH LAUT	13.404
6	HULU SUNGAI UTARA	13.929
7	BARITO KUALA	14.044
8	BANJAR	14.461
9	TANAH BUMBU	14.677
10	TABALONG	14.968
11	KOTABARU	15.978
12	HULU SUNGAI TENGAH	16.027
13	KOTA BANJARMASIN	33.376
	KALIMANTAN SELATAN	183.307

Gambar 3.1.
Grafik Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bandingkan dengan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Posisi relatif jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 meningkat dari kondisi posisi relatif tahun 2023. Pada tahun 2024 posisi relatif berada pada urutan ke-12 dari 13 kabupaten/kota. Posisi sebelumnya pada tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi dari kabupaten Hulu Sungai Tengah, tetapi pada tahun 2024 berada pada posisi lebih rendah dari penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

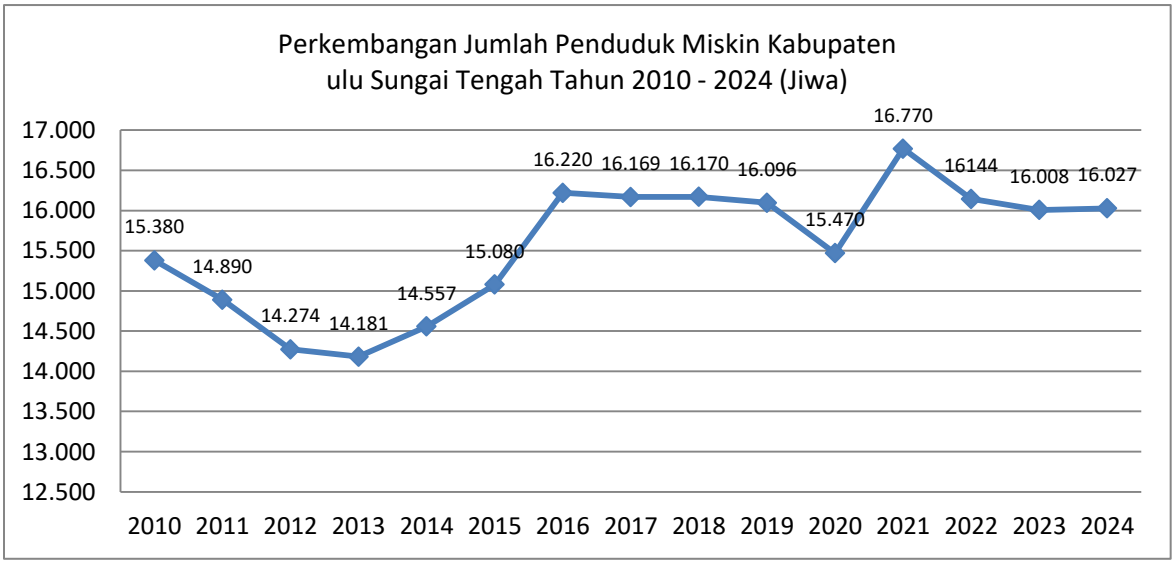
Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 16.008 jiwa, maka pada tahun 2024 bertambah sebanyak 19 jiwa menjadi 16.027 jiwa. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2010 - 2024 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2010	15.380
2011	14.890
2012	14.274
2013	14.181
2014	14.557
2015	15.080
2016	16.220
2017	16.169
2018	16.170
2019	16.096
2020	15.470
2021	16.770
2022	16 144
2023	16.008
2024	16.027

Dalam 12 tahun terakhir, perkembangan penduduk miskin dari tahun 2012 - 2024 berfluktuasi seperti terlihat pada grafik berikut.

Gambar 3.2.
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2024



Perbandingan perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan jumlah penduduk miskin Prov. Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

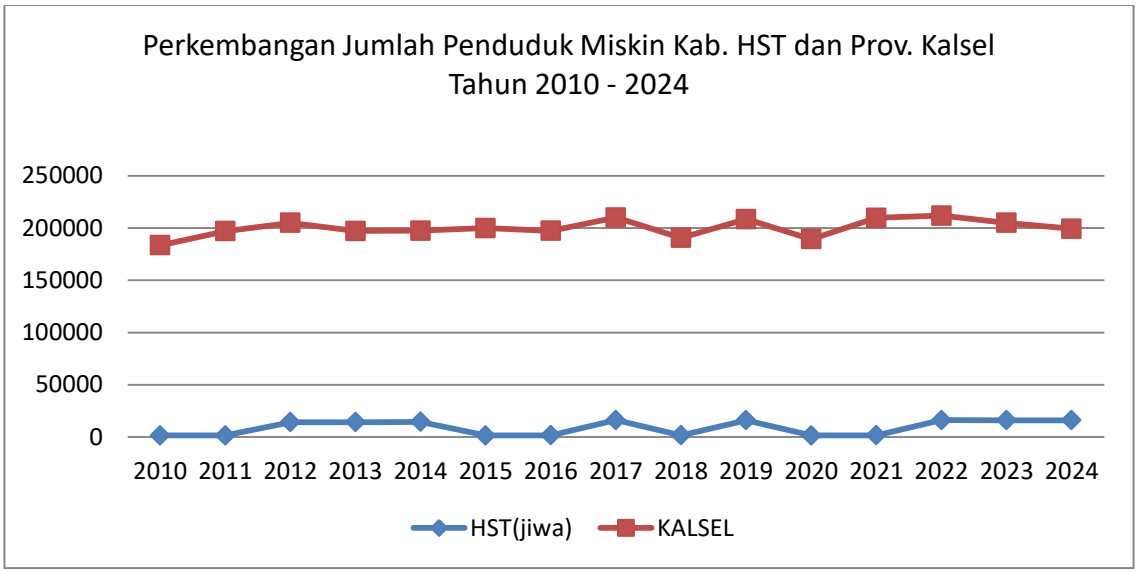
Tabel 3.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalsel
Tahun 2010 – 2024

Tahun	HST (jiwa)	KALSEL (jiwa)	% Penurunan/ Peningkatan HST	% Penurunan/ Peningkatan KALSEL
2010	15,380	181,963		
2011	14,890	195,523	-3.19	7.45

2012	14,274	190,694	-4.14	-2.47
2013	14,181	183,070	-0.65	-4.00
2014	14,557	182,876	2.65	-0.11
2015	15,080	198,436	3.59	8.51
2016	16,220	195,700	7.56	-1.38
2017	16,169	193,919	-0.31	-0.91
2018	16,170	189,033	0.01	-2.52
2019	16,096	192,480	-0.46	1.82
2020	15,470	187,874	-3.89	-2.39
2021	16,770	208,118	8.40	10.78
2022	16,144	195,702	-3.73	-5.97
2023	16,008	188,928	-0,85	-3,46
2024	16.027	183.307	0,12	-2.98

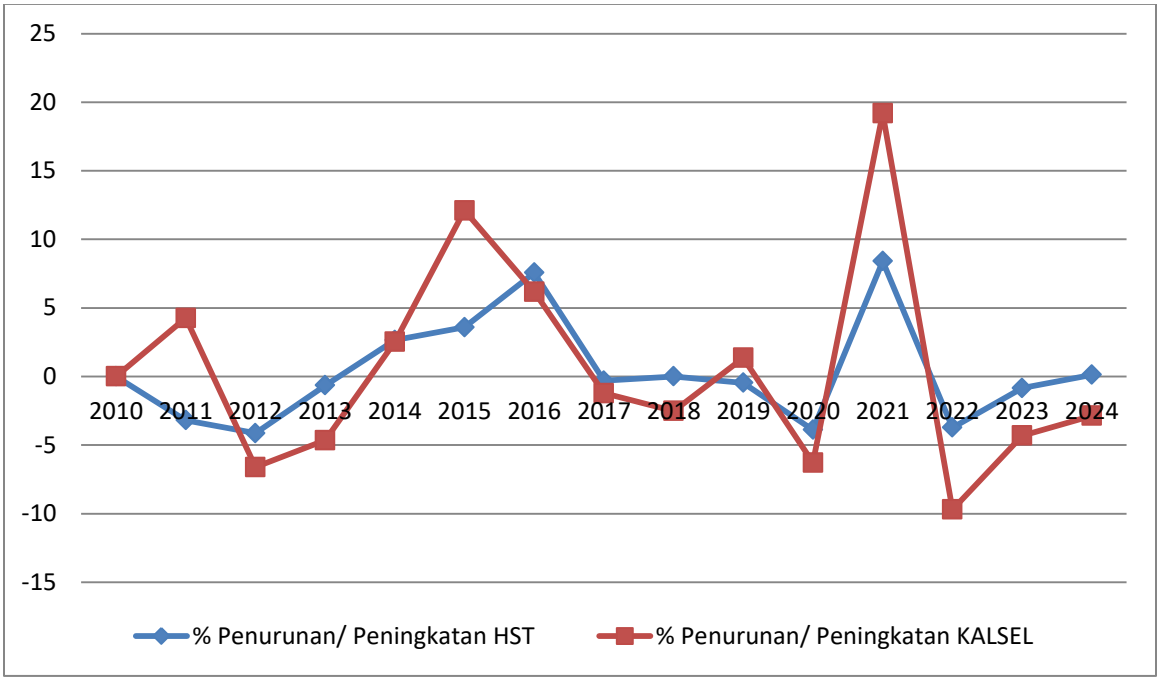
Penurunan penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih lebih rendah dari laju penurunan penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan. Relevansi antara perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.3.
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2010 – 2024



Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kab. HST cenderung punya relevansi dengan perkembangan jumlah penduduk miskin di Prov. Kalsel. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di Prov. Kalsel juga terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin di Kab. HST. Begitu juga sebaliknya bertambahnya jumlah penduduk miskin di Prov. Kalsel, maka terjadi juga penambahan jumlah penduduk miskin di Kab. HST. Dengan demikian yang mempengaruhi pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk miskin adalah faktor-faktor yang bersifat nasional dan regional. Tetapi relevansi tersebut tidak terjadi atau anomali pada tahun 2011, 2016,2019 dan 2024. Pada tahun 2011 dan 2019, jumlah penduduk miskin di Kab. HST terjadi pengurangan, tetapi jumlah penduduk miskin di Prov. Kalsel justru terjadi penambahan. Sebaliknya pada tahun 2016 dan 2024, jumlah penduduk miskin di Kab. HST terjadi peningkatan, tetapi jumlah penduduk miskin di Prov. Kalsel terjadi penurunan. Berarti ada faktor-faktor lokal yang terjadi yang menyebabkan perubahan tersebut.

Gambar 3.4.
Grafik Relevansi Perkembangan Persenatse Penurunan/Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2024



Pada gambar di atas terlihat pola grafik yang hampir sama antara pekembangan penurunan/peningkatan jumlah penduduk miskin antar wilayah. Perkembangan penduduk miskin Prov. Kalsel secara umum mempengaruhi terhadap perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

B. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Capaian persentase penduduk miskin (P0) Kab. HST pada tahun 2024 adalah sebesar 5,81 %. Secara posisi relatif capaian tersebut dibandingkan dengan kab./kota di Prov. Kalsel adalah berada pada urutan ke-13 dari 13 kab./kota dan berada di atas capaian Prov. Kalsel.

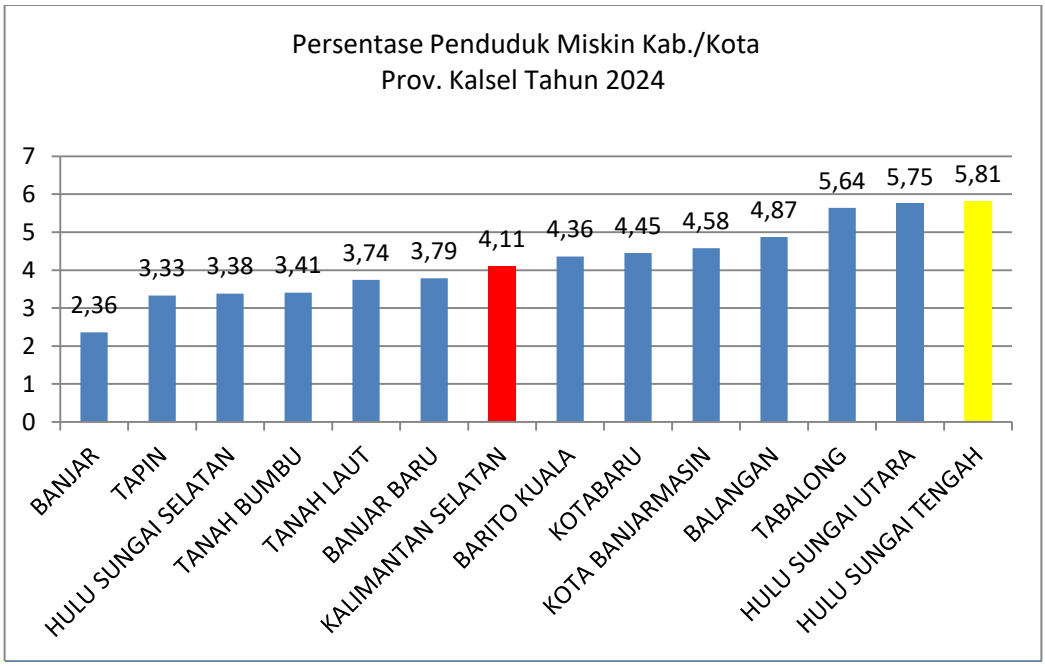
Capaian persentase penduduk miskin kab./kota di Prov. Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel
Tahun 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	% PENDUDUK MISKIN
1	BANJAR	2,36
2	TAPIN	3,33
3	HULU SUNGAI SELATAN	3,38
4	TANAH BUMBU	3,41
5	TANAH LAUT	3,74
6	BANJAR BARU	3,79
7	**KALIMANTAN SELATAN**	4,11
8	BARITO KUALA	4,36
9	KOTABARU	4,45
10	KOTA BANJARMASIN	4.58
11	BALANGAN	4,87
12	TABALONG	5,64
13	HULU SUNGAI UTARA	5,75
14	HULU SUNGAI TENGAH	5,81

Posisi relatif capaian persentase kemiskinan kab./kota di Prov. Kalsel dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5
Grafik Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin
Kab./Kota di Prov. Kalsel Tahun 2024



Posisi relatif capaian persentase kemiskinan tahun 2024 ini meningkat dari posisi relatif pada tahun 2023 yaitu pada peringkat ke-12 menjadi peringkat ke-13.

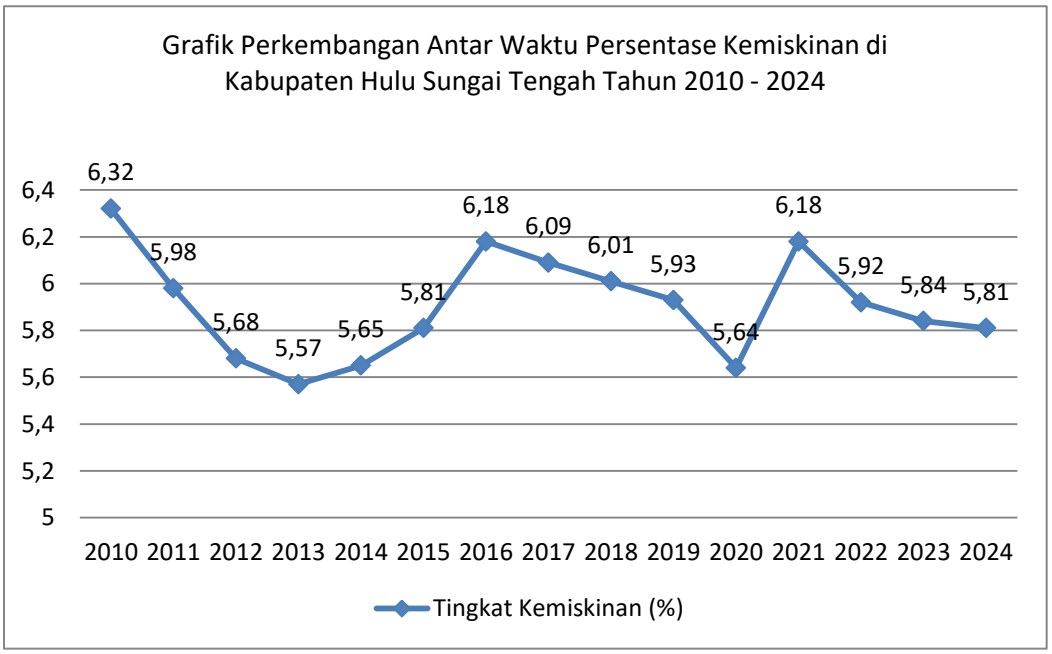
Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 menurun sebesar 0,03 % dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Perkembangan persentase penduduk miskin dari tahun 2010 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.5
Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 – 2024

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)
2010	6,32
2011	5,98
2012	5,68

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)
2013	5,57
2014	5,65
2015	5,81
2016	6,18
2017	6,09
2018	6,01
2019	5,93
2020	5,64
2021	6,18
2022	5,92
2023	5,84
2024	5,81

Gambar 3.6
Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 – 2024



Perkembangan antar waktu persentase tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun fluktuatif. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 6,32 % dan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 5,57 %. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya terjadi peningkatan dan puncaknya terjadi pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,18 %. Setelah itu terjadi penurunan sampai dengan tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 naik kembali seperti capaian pada tahun 2016 dan menurun lagi pada tahun 2022, 2023 dan 2024.

Perkembangan persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2011-2024 mempunyai relevansi dibandingkan dengan perkembangan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika terjadi penurunan atau kenaikan persentase tingkat kemiskinan provinsi Kalimantan Selatan menyebabkan terjadi juga penurunan atau kenaikan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data perkembangan persentase kemiskinan antar tingkat pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut.

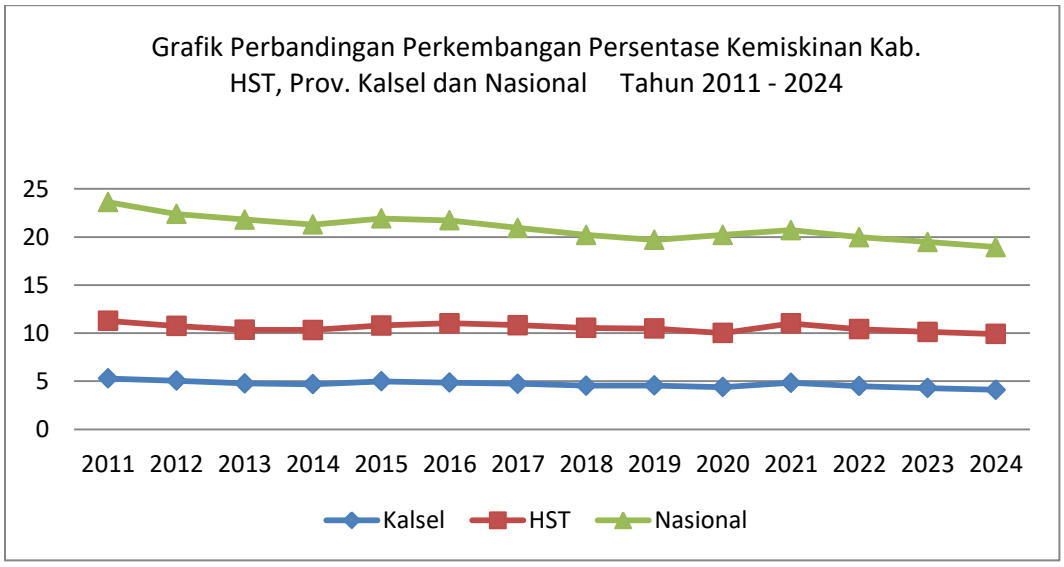
Tabel 3.6
Perbandingan Perkembangan Persentase Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2011 - 2024

Tahun	Kalsel	HST	Nasional	% Penurunan/Peningkatan		
2011	5.29	5.98	12.36	0.00	0.00	0.00
2012	5.06	5.68	11.66	-4.35	-5.02	-5.66
2013	4.77	5.57	11.47	-5.73	-1.94	-1.63
2014	4.68	5.65	10.96	-1.89	1.44	-4.45
2015	4.99	5.81	11.13	6.62	2.83	1.55
2016	4.85	6.18	10.7	-2.81	6.37	-3.86
2017	4.73	6.09	10.12	-2.47	-1.46	-5.42
2018	4.54	6.01	9.66	-4.02	-1.31	-4.55
2019	4.55	5.93	9.22	0.22	-1.33	-4.55
2020	4.38	5.64	10.19	-3.74	-4.89	10.52
2021	4.83	6.18	9.71	10.27	9.57	-4.71
2022	4.49	5.92	9.57	-7.04	-4.21	-1.44

2023	4,29	5,84	9,36	-4,45	-1,35	-2,19
2024	4,11	5,81	9,03	-4,20	-0,51	-3,53

Secara grafik perkembangan persentase kemiskinan antar tingkat pemerintahan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.7
Grafik Perbandingan Perkembangan Persentase Kemiskinan Kab. HST, Prov. Kalsel dan Nasional Tahun 2011 – 2024

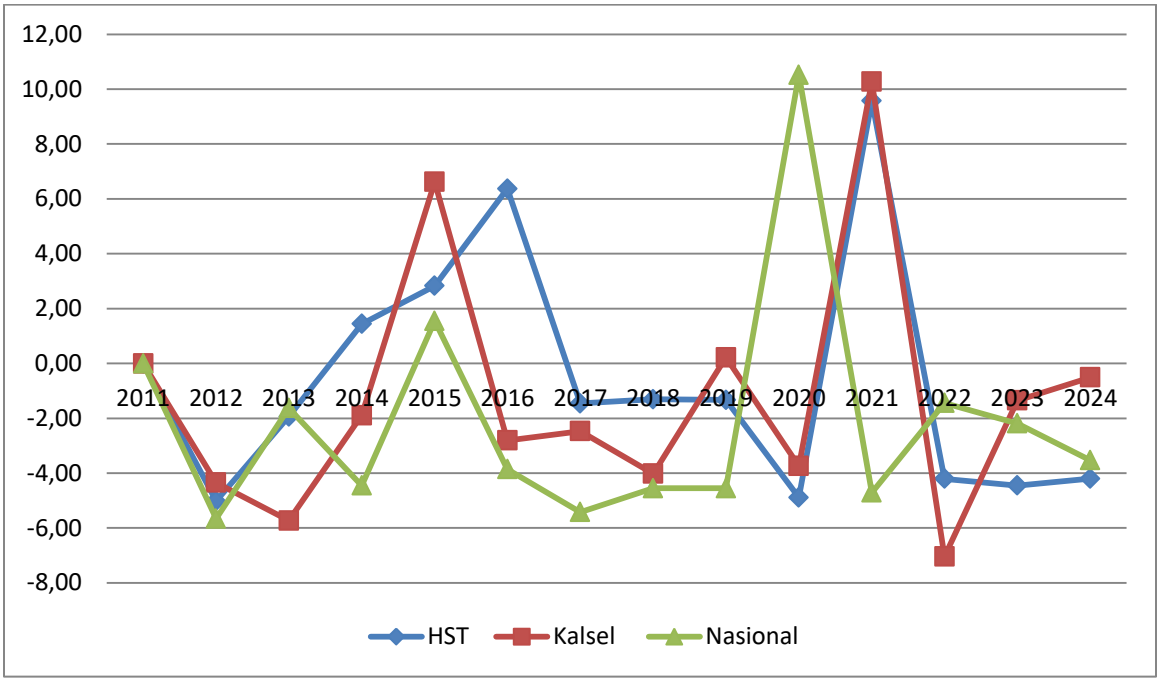


Perkembangan sosial perekonomian regional Prov. Kalsel cukup berpengaruh terhadap perkembangan kemiskinan di kabupaten. Tetapi ketika terjadi kenaikan persentase kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tetapi persentase kemiskinan di Prov. Kalsel turun, dimungkinkan adanya perkembangan sosial ekonomi lokal kabupaten yang mempengaruhinya.

Pada tahun 2016, persentase tingkat kemiskinan provinsi relevansinya rendah dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan kabupaten. Pada tahun tersebut, persentase tingkat kemiskinan provinsi menurun dari tahun sebelumnya, sedang

persentase tingkat kemiskinan kabupaten justru meningkat. Berarti ada faktor-faktor lokal kabupaten yang berpengaruh. Begitu juga sebaliknya pada tahun 2020, persentase tingkat kemiskinan nasional dan provinsi meningkat, justru persentase tingkat kemiskina kabupaten menurun.

Gambar 3.8Grafik Perbandingan Perkembangan Persentase Penurunan/Peningkatan Persentase Kemiskinan Kab. HST, Prov. Kalsel dan Nasional Tahun 2011 - 2024



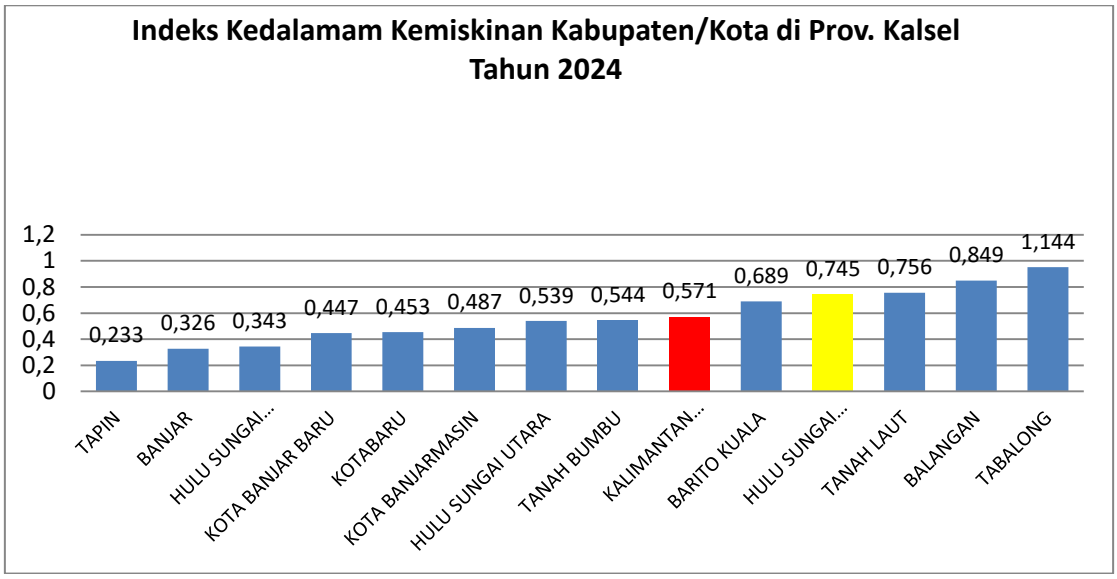
C. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Capaian indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebesar 0,745, lebih tinggi dari indeks kedalaman kemiskinan Prov. Kalsel yang mencapai 0,571. Capaian untuk masing-masing kabupaten/kota di Prov. Kalsel tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Indeks Kedalamam Kemiskinan Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel
Tahun 2024

KABUPATEN / KOTA	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)
TAPIN	0,233
BANJAR	0,326
HULU SUNGAI SELATAN	0.343
KOTA BANJAR BARU	0.447
KOTABARU	0.453
KOTA BANJARMASIN	0,487
HULU SUNGAI UTARA	0.539
TANAH BUMBU	0,544
KALIMANTAN SELATAN	0.571
BARITO KUALA	0,689
HULU SUNGAI TENGAH	0.745
TANAH LAUT	0,756
BALANGAN	0.849
TABALONG	0,953

Gambar 3.9
Grafik Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten / Kota di Prov. Kalsel Tahun 2024



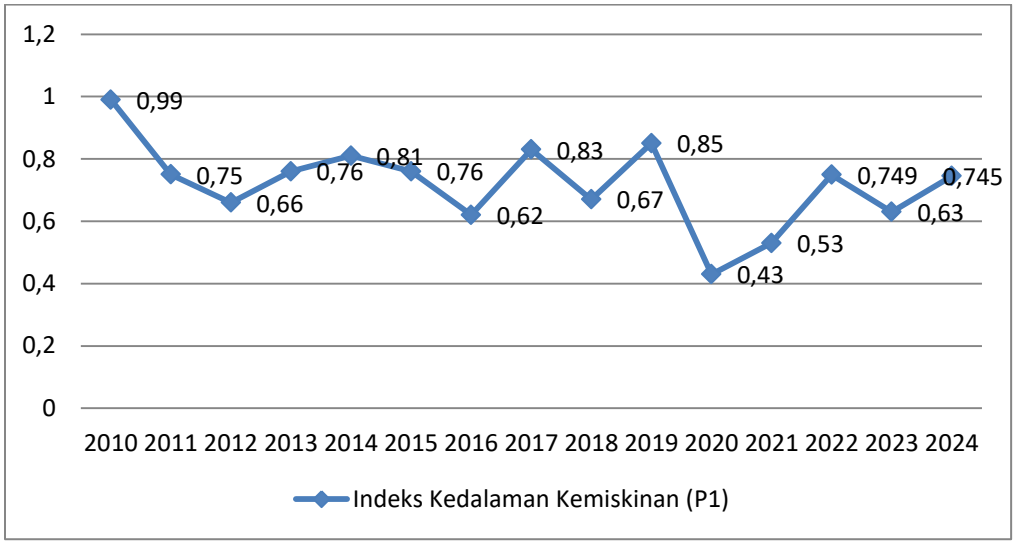
Dengan capaian indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024, maka posisi relatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah diantara kabupaten/kota di Prov Kalsel adalah berada pada urutan ke-10 tertinggi dari 13 kab/kota. Posisi tersebut lebih tinggi dari posisi Prov. Kalsel yang menempati urutan ke-9.

Tabel 3.8
Perkembangan Indeks Kedalamam Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
2010	0.99
2011	0.75
2012	0.66
2013	0.76
2014	0.81
2015	0.76
2016	0.62
2017	0.83
2018	0.67
2019	0.85
2020	0.43
2021	0.53
2022	0.749
2023	0,630
2024	0,745

Capaian indeks kedalaman kemiskinan (P1) tahun 2024 yaitu sebesar 0,745 meningkat sebesar 0,115 dari capaian tahun 2023 sebesar 0,630. Secara grafik perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2010 - 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.10
Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 – 2024



Perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010-2024 terlihat tidak mempunyai relevansi dibandingkan dengan perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan dan perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan nasional. Masing-masing tingkat pemerintahan mempunyai karakteristik tersendiri kedalaman kemiskinannya. Pada tahun 2010 tingkat kedalaman kemiskinan kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebesar 0,99 lebih tinggi dari tingkat kedalaman kemiskinan provinsi (0,69) tetapi lebih rendah dari tingkat kedalaman kemiskinan nasional (2,21). Perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan kabupaten selama periode tahun 2010 - 2020 terjadi penurunan sebesar 0,56 atau turun 56,56 %. Perkembangan tingkat kemiskinan provinsi terjadi stagnasi, sedang perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan nasional terjadi penurunan sebesar 0,46 atau turun 20,81 %. Pada

tahun 2024, tingkat kedalaman kabupaten sudah mencapai 0,745, lebih rendah dari tingkat kedalaman kemiskinan provinsi (0,57) dan angka nasional yaitu 1,46. Data perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan antar pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut.

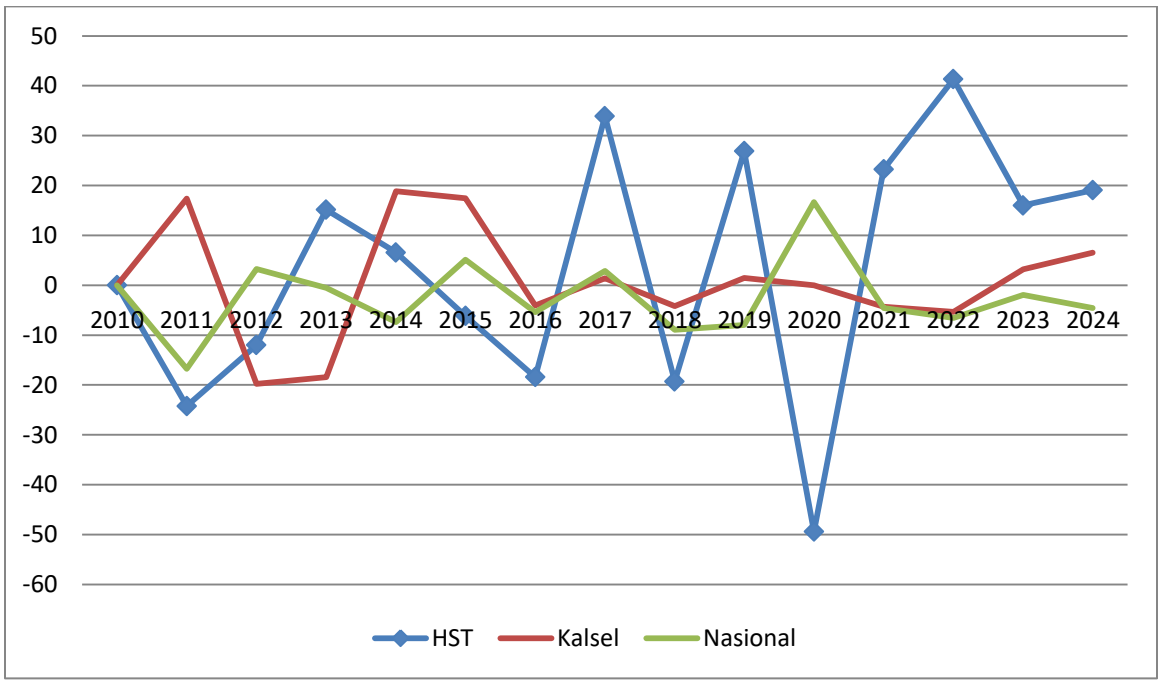
Tabel 3.9
Perbandingan Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2010 – 2024

Tahun	HST	Kalsel	Nasional	% Penurunan/Peningkatan		
2010	0.99	0.69	2.21	0.00	0.00	0.00
2011	0.75	0.81	1.84	-24.24	17.39	-16.74
2012	0.66	0.65	1.90	-12.00	-19.75	3.26
2013	0.76	0.53	1.89	15.15	-18.46	-0.53
2014	0.81	0.63	1.75	6.58	18.87	-7.41
2015	0.76	0.74	1.84	-6.17	17.46	5.14
2016	0.62	0.71	1.74	-18.42	-4.05	-5.43
2017	0.83	0.72	1.79	33.87	1.41	2.87
2018	0.67	0.69	1.63	-19.28	-4.17	-8.94
2019	0.85	0.70	1.50	26.87	1.45	-7.98
2020	0.43	0.70	1.75	-49.41	0.00	16.67
2021	0.53	0.67	1.67	23.26	-4.29	-4.57
2022	0.75	0.63	1.56	41.32	-5.37	-6.59
2023	0,63	0,61	1,53	-16,00	3,175	-1,92
2024	0,75	0,57	1,46	19.05	-6,56	-4,58

Tingkat kedalaman kemiskinan kabupaten mendekati tingkat kedalaman kemiskinan provinsi tetapi masih berada di bawah tingkat kedalaman kemiskinan provinsi dan nasional, seperti terlihat pada grafik berikut

Pada grafik terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan antar tingkat pemerintahan tidak mempunyai relevansi yang kuat dan masing-masing mempunyai karakteristik indeks kedalaman kemiskinan tersendiri.

Gambar 3.11
Grafik Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Antar Tingkat Pemerintahan Tahun 2010 - 2024



D. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Capaian indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebesar 0,141, lebih tinggi dari indeks keparahan kemiskinan Prov. Kalsel yang mencapai 0,116. Capaian untuk masing-masing kabupaten/kota di Prov. Kalsel tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

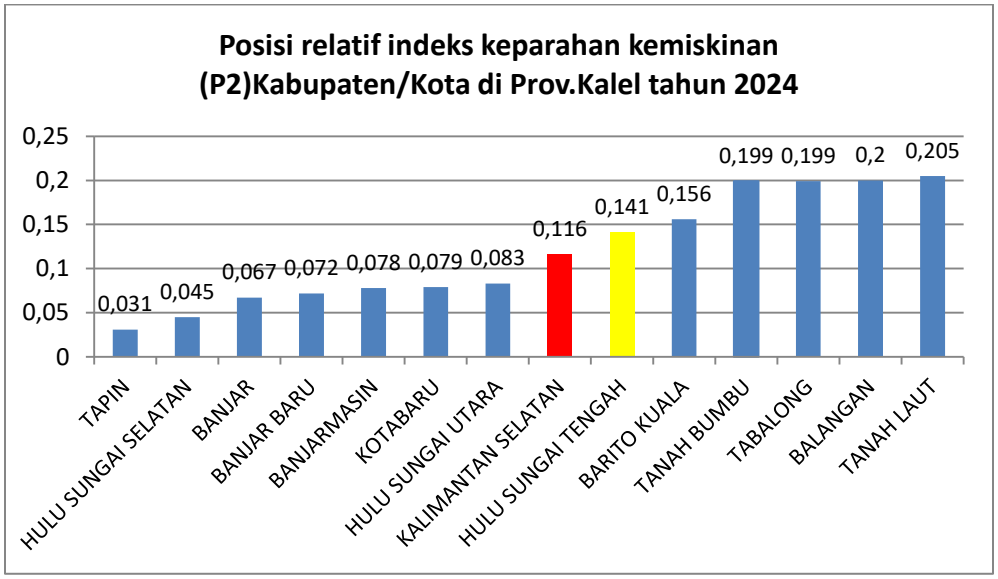
Tabel 3.10
Capaian indeks keparahan kemiskinan (P2)Kabupaten/Kota di Prov.Kalsel tahun 2024

KABUPATEN / KOTA	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
TAPIN	0,031
HULU SUNGAI SELATAN	0,045
BANJAR	0.067

BANJAR BARU	0,072
BANJARMASIN	0,078
KOTABARU	0,079
HULU SUNGAI UTARA	0,083
KALIMANTAN SELATAN	0,116
HULU SUNGAI TENGAH	0,141
BARITO KUALA	0.156
TANAH BUMBU	0,199
TABALONG	0,199
BALANGAN	0,200
TANAH LAUT	0,205

Dengan capaian tersebut, maka posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 berada pada urutan ke-9. Indeks keparahan kemiskinan terendah ada di Kabupaten Tapin dan tertinggi di kabupaten Tanah Laut. Posisi relatif masing-masing Kabupaten/Kota tergambar pada grafik berikut ini.

Gambar 3.12
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten / Kota di Prov. Kalsel Tahun 2024



Capaian tahun 2024 Hulu Sungai Tengah 0,141 .

.

Posisi relatif untuk masing-masing kabupaten /kota terjadi pergeseran kalau dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024, yang terendah adalah Kabupaten Tapin dan terparah Kabupaten Tanah Laut.

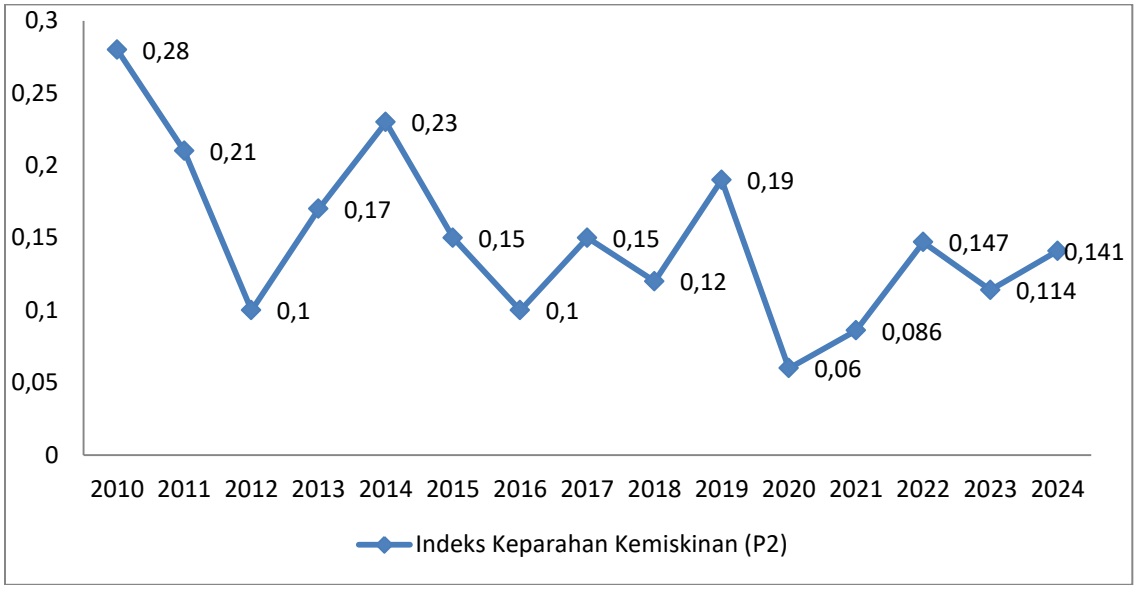
Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 terjadi peningkatan 0,27 di bandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 3.11
Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2010 - 2024

Tahun	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2010	0.280
2011	0.210
2012	0.100
2013	0.170
2014	0.230
2015	0.150
2016	0.100
2017	0.150
2018	0.120
2019	0.190
2020	0.060
2021	0.086
2022	0,147
2023	0,114
2024	0,141

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan dari tahun 2010 - 2024 capaiannya masih berfluktuasi, tetapi cenderung mengalami kenaikan, seperti terlihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 3.13
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 – 2024



Selama periode tahun 2010 - 2024, telah dapat dikurangi tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari 0,28, menjadi 0,141, walaupun pengurangannya belum stabil.

Perbandingan perkembangan capaian indeks keparahan kemiskinan antar tingkat pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Perbandingan perkembangan capaian indeks keparahan kemiskinan antar tingkat pemerintahan

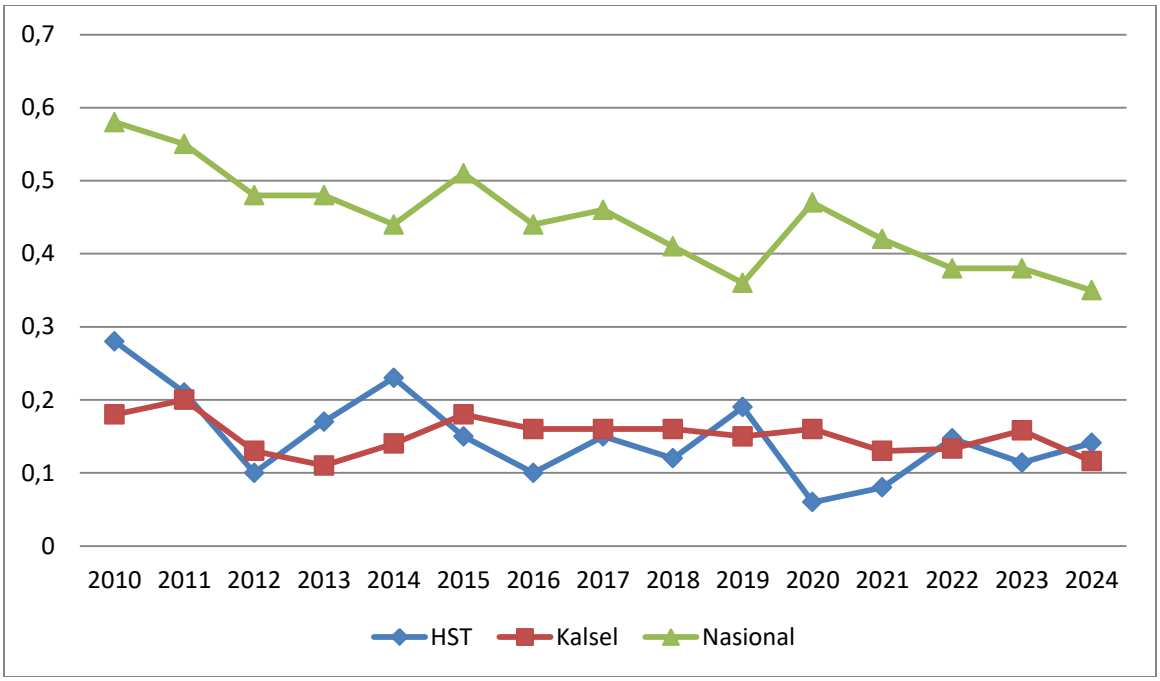
Tahun	HST	KALSEL	NASIONAL	% Penurunan/Peningkatan		
2010	0.28	0.18	0.58	0.00	0.00	0.00

2011	0.21	0.2	0.55	-25.00	11.11	-5.17
2012	0.1	0.13	0.48	-52.38	-35.00	-12.73
2013	0.17	0.11	0.48	70.00	-15.38	0.00
2014	0.23	0.14	0.44	35.29	27.27	-8.33
2015	0.15	0.18	0.51	-34.78	28.57	15.91
2016	0.1	0.16	0.44	-33.33	-11.11	-13.73
2017	0.15	0.16	0.46	50.00	0.00	4.55
2018	0.12	0.16	0.41	-20.00	0.00	-10.87
2019	0.19	0.15	0.36	58.33	-6.25	-12.20
2020	0.06	0.16	0.47	-68.42	6.67	30.56
2021	0.08	0.13	0.42	33.33	-18.75	-10.64
2022	0.147	0.133	0.38	83.75	2.31	-9.52
2023	0.114	0.158	0,38	0,224	0,188	0,00
2024	0,141	0,116	0,35	23,68	-26,58	-7,89

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih tinggi dari capaian Prov. Kalsel dan capaian Prov. Kalsel lebih tinggi dari nasional.

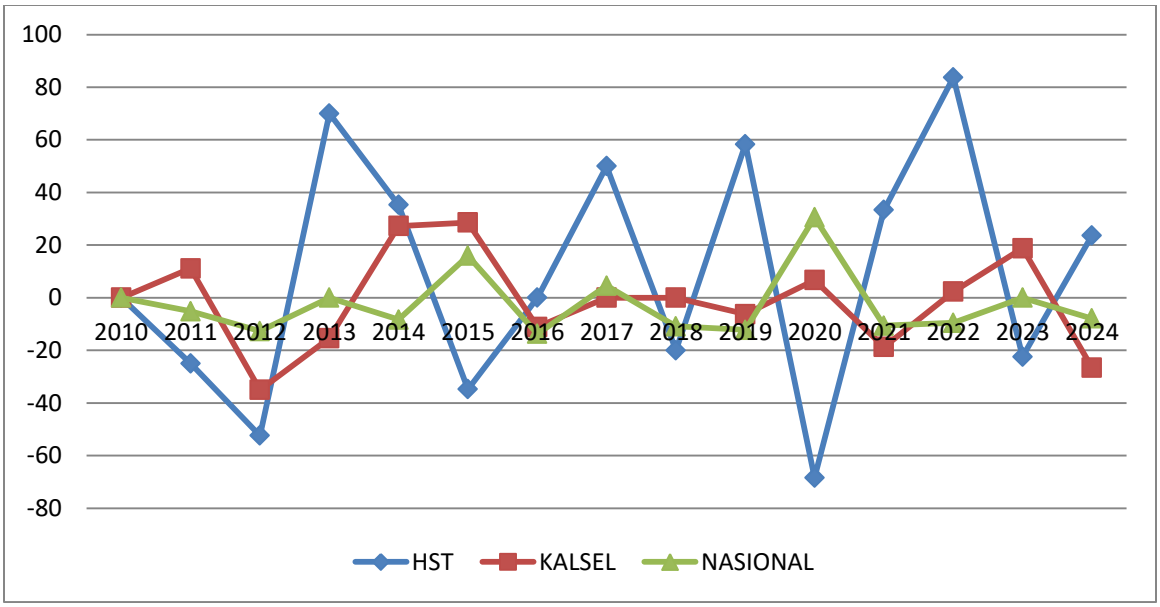
Perkembangan indeks keparahan kemiskinan antar tingkat pemerintahan, masing-masing cenderung mengalami penurunan dari periode 2010 - 2024, walaupun antar tingkat pemerintahan penurunan ataupun kenaikan masing-masing terlihat kecil relevansinya. Capaian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 terlihat meningkat dari tahun 2024, tetapi untuk capaian Prov. Kalsel mengalami kenaikan dan lebih tinggi dari nasional . Perkembangan masing-masing tingkat pemerintahan bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.14
Grafik Perbandingan Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kab. HST, Prov. Kalsel dan Nasional Tahun 2010 - 2024



Perkembangan indeks keparahan kemiskinan antar tingkat pemerintahan selama tahun 2010 – 2024 terlihat ada relevansinya walaupun tidak terlalu nyata seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.15
Grafik Relevansi Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kab. HST, Prov. Kalsel dan Nasional Tahun 2010 - 2024



E. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 513.950,-. Garis kemiskinan tahun 2023 ini naik sebesar 38.925,- dari tahun 2023. Perbandingan garis kemiskinan kabupaten/kota di Prov.Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut.

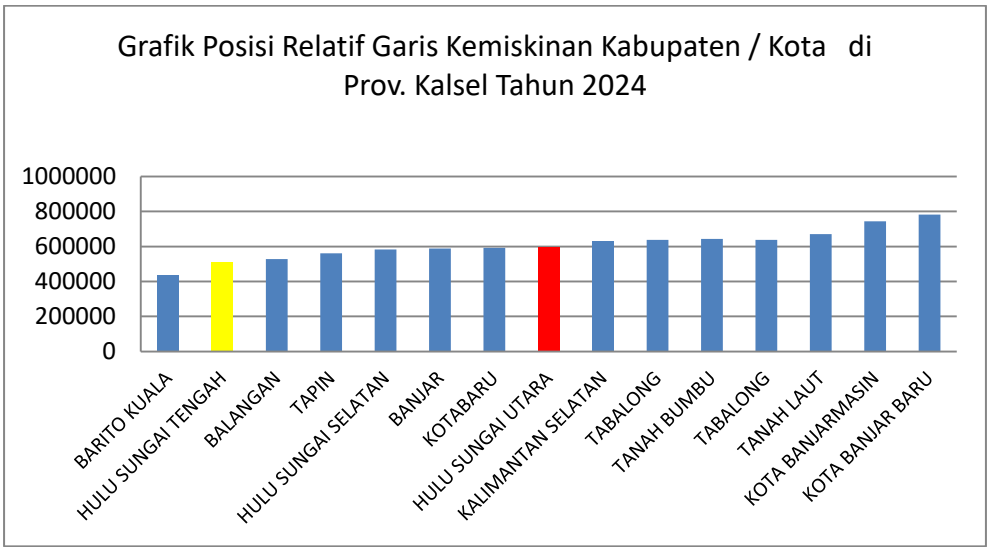
Tabel 3.13
Perbandingan garis kemiskinan kabupaten/kota di Prov.Kalsel

KABUPATEN / KOTA	GARIS KEMISKINAN TAHUN 2024 (Rp)
BARITO KUALA	437.579.00
HULU SUNGAI TENGAH	513.950.00
BALANGAN	528.104.00
TAPIN	561.101.00
HULU SUNGAI SELATAN	583.549.00
BANJAR	589.165.00
KOTABARU	592.230.00
HULU SUNGAI UTARA	597.894.00
KALIMANTAN SELATAN	632.739.00
TABALONG	637.132.00
TANAH BUMBU	643.652.00
TABALONG	637.132.00

KABUPATEN / KOTA	GARIS KEMISKINAN TAHUN 2024 (Rp)
TANAH LAUT	670.062.00
KOTA BANJARMASIN	743.872.00
KOTA BANJAR BARU	781.405.00

Posisi relatif garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 berada pada posisi terkecil ke-2 setelah Kabupaten Barito Kuala dengan selisih sebesar Rp 76.371,-. Posisi relatif masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.16
Grafik Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel Tahun 2024



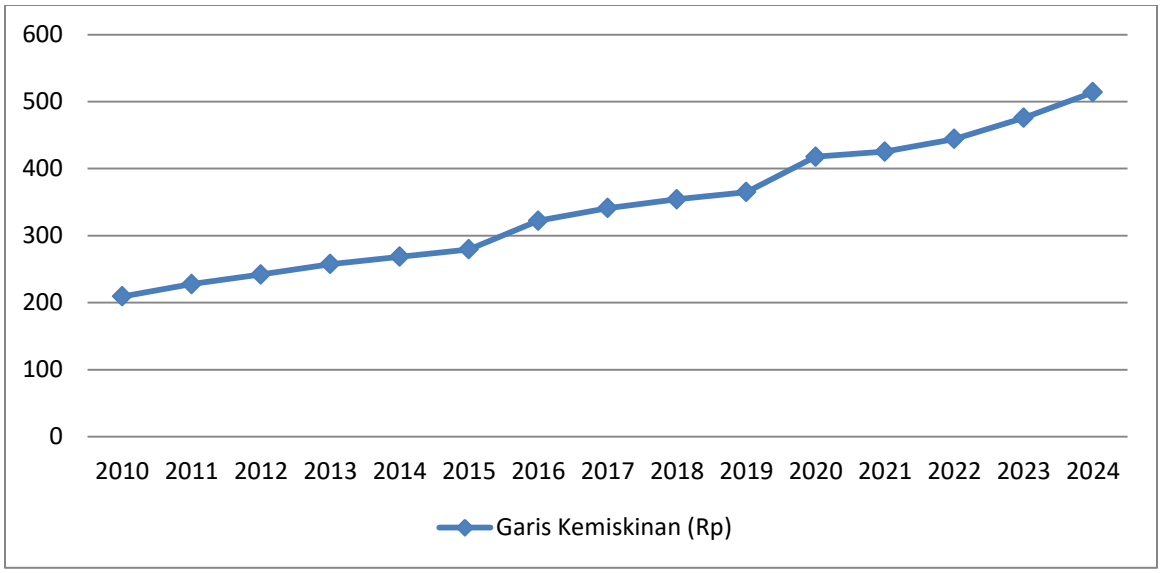
Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010 – 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Peningkatan (%)
2010	209,272.00	-
2011	227,761.00	8.83
2012	241,973.00	6.24
2013	257,580.00	6.45
2014	268,522.00	4.25
2015	279,530.00	4.10
2016	322,392.00	15.33
2017	341,024.00	5.78
2018	354,214.00	3.87
2019	365,008.00	3.05
2020	417,778.00	14.46
2021	425,438.00	1.83
2022	444.331.00	4,44
2023	475.655.00	0,07
2024	513.950.00	8,05

Dari tahun ke tahun perkembangan garis kemiskinan terus meningkat. Selama periode tahun 2010 - 2024. Pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 209.272,- meningkat menjadi Rp 513.950,- pada tahun 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 15,33 % dan pada tahun 2020 sebesar 14,46 %. Rata-rata peningkatan per tahun selama periode tersebut adalah 6,51 %. Secara grafik perkembangan garis kemiskinan tahun 2010 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 3.17
Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 - 2024



Garis kemiskinan selalu meningkat setiap tahun secara linear.

Perbandingan perkembangan garis kemiskinan antar tingkat pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Perbandingan Perkembangan Garis Kemiskinan Antar Tingkat Pemerintahan Tahun 2013 - 2024

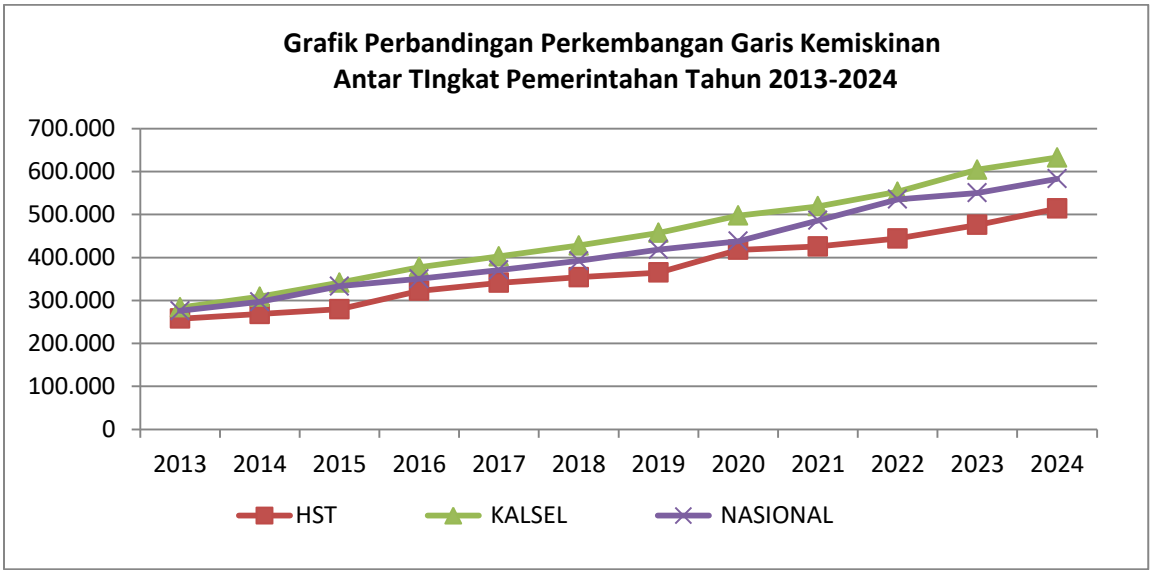
Tahun	HST	KALSEL	NASIONAL
2013	257,580.00	283,515.00	275,779.00
2014	268,522.00	308,512.00	296,681.00
2015	279,530.00	341,350.00	333,034.00
2016	322,392.00	377,480.00	350,420.00
2017	341,024.00	402,424.00	370,910.00
2018	354,214.00	427,774.00	392,154.00
2019	365,008.00	457,222.00	418,515.00
2020	417,778.00	497,262.00	437,902.00
2021	425,438.00	519,150.00	486,168.00
2022	444,331.00	553,073.00	535,547.00
2023	475,655.00	604,266.00	550.458,00

2024	513.950.00	632.739.00	582.932,00

Garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih rendah dari Provinsi Kalsel dan nasional, tetapi garis kemiskinan provinsi Kalsel lebih tinggi dari nasional.

Garis kemiskinan selalu meningkat setiap tahun dan mempunyai relevansi antar tingkat pemerintahan walaupun besarannya bervariasi antar waktu, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.18
Grafik Perbandingan Perkembangan Garis Kemiskinan Antar Tingkat Pemerintahan Tahun 2013 - 2024



F. Indeks Gini

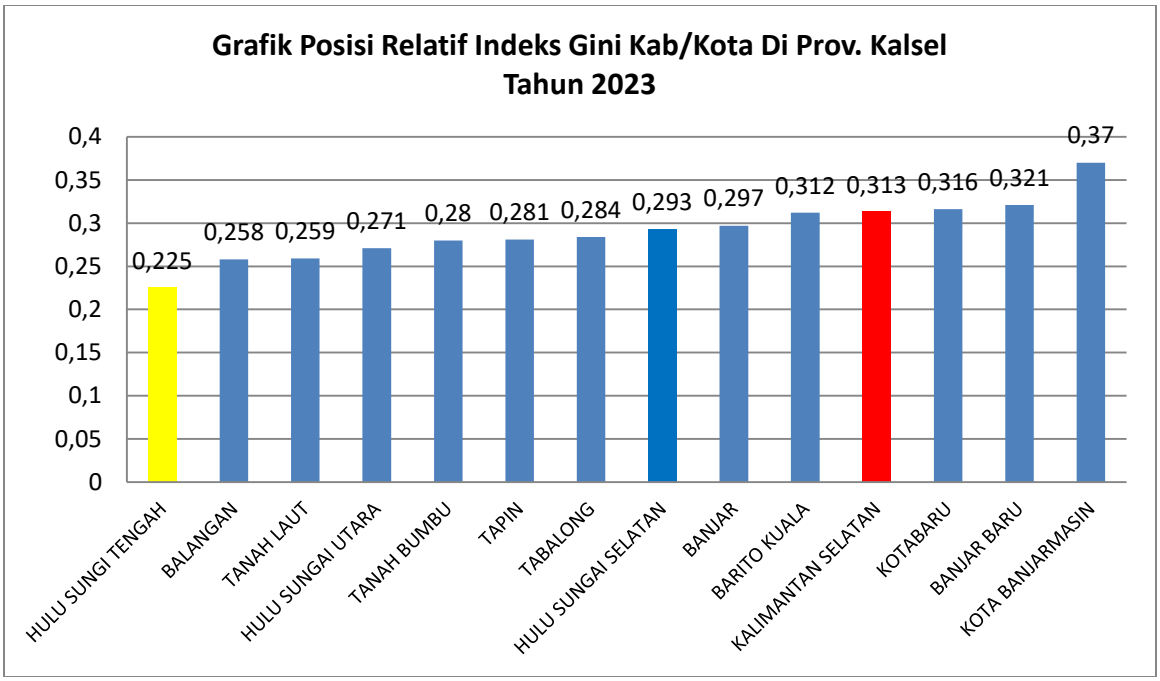
Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2023 adalah sebesar 0,225. Indeks gini tahun 2023 ini turun sebesar 0,003 dari tahun 2022. Perbandingan indeks gini kabupaten/kota di Prov.Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Perbandingan indeks gini kabupaten/kota di Prov.Kalsel

KABUPATEN/KOTA	INDEKS GINI TAHUN 2023
HULU SUNGI TENGAH	0.225
BALANGAN	0,258
TANAH LAUT	0,259
HULU SUNGAI UTARA	0,271
TANAH BUMBU	0,280
TAPIN	0,281
TABALONG	0,284
HULU SUNGAI SELATAN	0.293
BANJAR	0,297
BARITO KUALA	0.312
KALIMANTAN SELATAN	0.313
KOTABARU	0.316
BANJAR BARU	0.321
KOTA BANJARMASIN	0.370

Tingkat ketimpangan (indeks gini) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut lebih rendah dari tingkat ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan (0,313) dan paling kecil dari kabupaten /kota yang ada di Prov. Kalsel. Tingkat ketimpangan terbesar ada di Kota Banjarmasin (0,370). Posisi relatif capaian indeks gini Kaupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023 dibandingkan kabupaten/kota lain di Prov. Kalimantan Selatan adalah berada di urutan ke -1 terendah dari 13 kabupaten/kota.

Gambar 3.19
Grafik Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel
Tahun 2023



Posisi relatif indeks gini kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023 di posisi 1.

Perkembangan indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2010 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

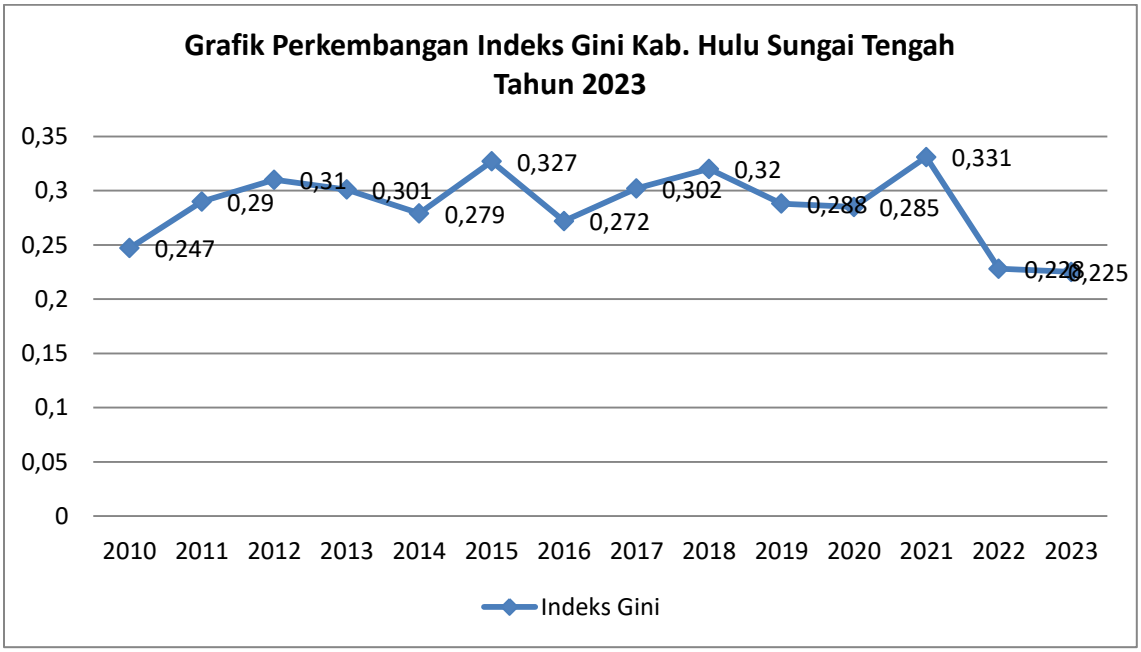
Tabel 3.17
Perkembangan indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah
tahun 2010 – 2023

Tahun	Indeks Gini
2010	0.247
2011	0.290
2012	0.310
2013	0.301
2014	0.279

2015	0.327
2016	0.272
2017	0.302
2018	0.320
2019	0.288
2020	0.285
2021	0.331
2022	0,228
2023	0.225

Secara grafik perkembangan indeks gini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.20
Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2010 – 2023



Dari gambar terlihat bahwa indeks gini fluktuatif dengan kecenderungan indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah semakin

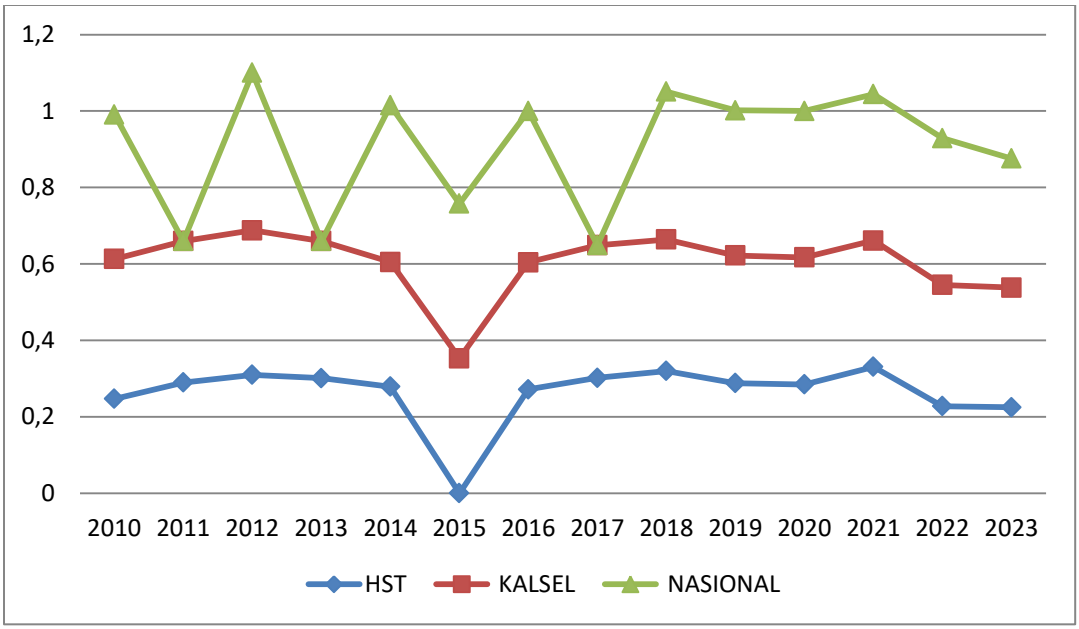
meningkat. Indeks gini terendah terjadi pada tahun 2023 dan tertinggi terjadi pada tahun 2021.

Perbandingan perkembangan garis kemiskinan antar tingkat pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Perkembangan Indeks Gini Antar Tingkat Pemerintahan
Tahun 2010 – 2023

Tahun	HST	KALSEL	NASIONAL
2010	0.247	0.366	0.378
2011	0.290	0.370	0.399
2012	0.310	0.378	0.412
2013	0.301	0.359	0.410
2014	0.279	0.326	0.410
2015	0.327	0.353	0.405
2016	0.272	0.332	0.396
2017	0.302	0.347	0.392
2018	0.320	0.344	0.387
2019	0.288	0.334	0.380
2020	0.285	0.332	0.383
2021	0.331	0.330	0.383
2022	0.228	0.317	0.384
2023	0,225	0,313	0,338

Gambar 3.21
Grafik Perkembangan Indeks Gini Antar Tingkat Pemerintahan
Tahun 2010 - 2022



Indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih lebih rendah dari indeks gini Prov. Kalsel dan indeks gini Prov. Kalsel lebih rendah dari Nasional. Indeks gini Kab. HST , Prov. Kalsel dan Nasional perkembangannya cenderung menurun .

Perkembangan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Perkembangan DTKS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2016 - 2023

NO.	KECAMATAN	DTKS TAHUN								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	HARUYAN	7,337	7,337	7,781	7,761	8,384	11,564	11.383	10.905	10.743
2	BATU BENAWA	7,074	7,074	7,099	7,209	2,928	10,362	10.304	9.666	9.677

3	HANTAKAN	6,395	6,395	6,478	6,466	6,172	7,019	7.472	6.797	6.725
4	BATANG ALAI SELATAN	8,749	8,749	9,004	8,909	10,381	13,075	12.976	11.980	11.811
5	BATANG ALAI TIMUR	3,607	3,607	3,628	3,617	3,871	4,469	4.393	4.171	4.162
6	BARABAI	9,552	9,552	9,723	9,659	9,425	13,419	13.937	12.972	12.710
7	LABUAN AMAS SELATAN	9,349	9,349	9,440	10,075	10,396	12,711	12.549	11.670	11.494
8	LABUAN AMAS UTARA	5,536	5,536	5,572	5,593	5,581	7,810	7.777	7.250	7.157
9	PANDAWAN	13,462	13,462	14,154	13,998	14,143	18,187	13.904	17.156	16.792
10	BATANG ALAI UTARA	7,823	7,823	7,997	8,040	7,602	11,993	10.655	10.441	10.198
11	LIMPASU	4,299	4,299	4,651	4,746	4,796	5,628	4.695	4.459	5.199
JUMLAH		83,183	83,183	85,527	86,073	83,679	116,237	110.045	107.467	106.668

BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT

Dari hasil analisis capaian kinerja dan anggaran serta data kemiskinan maka ada beberapa permasalahan yaitu :

1. Data kemiskinan *by name by address* yang belum valid dan sinkron.
2. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan belum efektif.
3. Belum adanya satu data kemiskinan yang digunakan menjadi rujukan bagi pelaksanaan semua program dan kegiatan.
4. Masih belum tingginya komitmen pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan.
5. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan.

Rencana tindaklanjut untuk perbaikan pelaksanaan program adalah :

1. Adanya kesepakatan dan komitmen untuk penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai rujukan sasaran pelaksanaan program.
2. Percepatan validasi data P3KE baik oleh Pemerintah Desa maupun Perangkat Daerah.
3. Percepatan penggunaan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT).
4. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.
5. Peningkatan komitmen pelaksanaan program
6. Meminta kepada Perangkat Daerah agar setiap penyaluran bantuan kepada masyarakat agar berbasis NIK dan dilaporkan ke Sekretariat TKPKD.

BAB V
PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator kemiskinan konsumsi :
   a. Jumlah penduduk miskin sebanyak 16.027 jiwa, berkurang 19 jiwa dari tahun 2023. Jumlah penduduk miskin berada pada urutan ke 12 terbanyak di banding 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
   b. Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 adalah sebesar 5,81 %, turun sebesar 0,03 % dari tahun 2023 dan berada pada urutan 13 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
   c. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2024 adalah sebesar 0,745, meningkat 0,115 dari tahun 2023 dan berada pada urutan ke 10 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
   d. Indeks keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2024adalah sebesar 0,141, turun 0,003 dari tahun 2023 dan berada pada urutan ke 8 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
   e. Garis kemiskinan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 513,950.00 naik Rp 38.295,- dari tahun 2023 dan berada pada urutan ke 1 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Berdasarkan DTKS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar 106.668 jiwa, turun 799 jiwa dari tahun 2023.
3. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan melalui 15 program dilaksanakan oleh 11 perangkat daerah kabupaten dan 1 Lembaga swasta dengan total anggaran Rp

5. 2. Rekomendasi

Untuk peningkatan kinerja baik kinerja kelembagaan maupun dampak dari pelaksanaan program maka perlu dilakukan :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
2. Peningkatan koordinasi dan komitmen pelaksanaan program.
3. Pembuatan data terpadu kemiskinan yang valid yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Tabel III.1

Rencana Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA	KELOMPOK PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	9.
1	Dinas Sosial, PPKB, PPPA	Bantuan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.901.250.000
2	Dinas Pendidikan	Bantuan Sosial	Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	500.000.000
3		Bantuan Sosial	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menegah Pertama		100.000.000
4	Dinas Kesehatan	Bantuan Sosial	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40.000.000.000
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Bantuan Sosial	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	2.483.739.900
6		Bantuan Sosial	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	8.512.229.700
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Bantuan Sosial	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.115.775.600
8		Bantuan Sosial	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.095.859.900
9		Bantuan Sosial	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	4.237.159.000

NO.	PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA	KELOMPOK PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	9.
10	DINAS PMD	Bantuan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kewenangan Kabupaten.	17.056.800.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bantuan Sosial	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	299.901.100
12		Bantuan Sosial	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten	830.970.600
13	Baznas	Bantuan Sosial	Pendataan Fakir Miskin Setiap Kecamatan		69.000.000
14	Dinas penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga kerja (21.07.03)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)	701.976.000
15	Dinas Ketahanan Pangan	pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	156.000.000
16		pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Kota	1.911.500.000
17	Dinas Pertanian	pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.063.000.000
18		pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil		Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	1.877.527.000
19		pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil	Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	231.322.000

REAUSASI RENCANA AKSI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2024
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/Desa)	Sasaran Penerima Manfaat	Kendala Pelaksanaan	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
No Urut	Diisi menurut tiga strategi PPKE yaitu: 1. Mengurangi Beban Pengeluaran 2. Meningkatkan Pendapatan 3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Diisi nama unit pelaksana kegiatan atau Perangkat Daerah penanggung jawab (contoh: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan)	Diisi dengan kode subkegiatan nomenklatur Permendagri No 050-5889 Tahun 2021. (contoh: 1 06 05 2.02 01)	Diisi dengan nama program terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai Permendagri No 050-5889 Tahun 2021	Diisi dengan nama sub kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai Permendagri No 050-5889 Tahun 2021	Diisi dengan jumlah/besaran alokasi anggaran dalam rupiah untuk program dan kegiatan	Diisi dengan sumber pembiayaan untuk program, kegiatan/sub kegiatan, antara lain: APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBDes dan sumber lain (Lembaga Donor, YSA, Dunia Usaha, Masyarakat, dsb)	Diisi dengan realisasi anggaran dalam rupiah untuk intervensi program dan kegiatan	Diisi dengan nama desa lokasi kegiatan dalam implementasi program	Diisi dengan jumlah rumah tangga/individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan	Diisi dengan kendala pelaksanaan program kegiatan PPKE	Diisi dengan nilai bantuan yang diberikan ke setiap penerima manfaat	Diisi dengan informasi durasi pemberian bantuan (misal: setiap bulan, per triwulan dll)
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial, PPKB, PPPA	1.06.05.2.02.0003	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.901.250.000	APBD	-	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	7605 Orang	Tidak Ada	250.000 per orang	Hanya sekali dalam satu tahun
2	Mengurangi Beban Pengeluaran	Bidang YanKes Dinas Kesehatan	1.02.02.202.0026	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40.000.000.000	APBD KAB	39.372.949.500	Seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	69864	Masih ditemukan masyarakat HST yang didaftarkan ke UHC NIK nya tidak valid/tidak terkonsulidasi ke pusat	Iuran per orang per bulan Rp. 35.000/orang/bulan dan Bantuan Iuran Rp. 2.800/orang/bulan	Januari s.d. Desember 2024
3	Meningkatkan Pendapatan	Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.25.04.2.02.0001	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	156.000.000	APBD Kab/Kota	134.000.000	Kecamatan Barabai(Ds.Banua Binjai,Pajukungan,Gambah)	Diberikan kepada masyarakat miskin yang masuk data P3KE	Dalam Proses Pengadaan	Setiap orang mendapatkan paket sarana budidaya ikan seperti - Benih ikan nila -Pakan Ikan	Direalisasikan pada Bulan Juni 2024 - Diberikan 1 kali -Bantuan Lanjutan Sebelumnya pada tahun 2023
4	Meningkatkan Pendapatan	Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.25.04.2.02.0001	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil kota	1.911.500.000	APBD Kab/Kota	1.621.840.000	1. Kec Barabai(Desa Banua Budi dan Desa Benawa Tengah) 2. Kec BAT (Desa Atiran , Desa Nateh dan Desa Hinas Kiri) 3. Kec BAU (Desa Dangu) 4. Kec BAS(Desa Anduhum dan Desa Limbar)	100 Individu/klg	Tidak Ada	Setiap orang mendapatkan paket sarana budidaya ikan seperti - Kolam, Terpal/BioFlok, Benih ikan nila -Pakan Ikan dan Garam	Direalisasikan pada Bulan September s.d Desember 2024
5	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pertanian	3.27.02.2.01.0002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.877.527.000	APBD Kab + Dana Insentif Fiskal Daerah	1.702.590.000	10 Kecamatan di Kab. HST	Diberikan kepada 600 KK Penerima Bantuan yang termasuk dalam data PK3E kab HST	Ada beberapa data dalam PK3E yang tidak valid sehinggas beberapa kali harus melakukan validasi dan verifikasi	Kegiatan ini dilakukan dengan membagi bantuan pertanian untuk Budidaya Cabe Rawit kepada masing-masing Petani dengan Besaran jumlah per 1 orang petani mendapatkan : Benih Cabe 1 bungkus (Rp.120.000), mulsa 1 rol (Rp.400.000),Pupuk NPK 10 kg (Rp.246.800), Pot Tray 15 buah (Rp.300.000), Kapur 1 zak (Rp.230.000), Insektisida cair 1 botol (Rp.158.100) Fungisida 1 botol (Rp.150.000) Pestisida 1 liter (Rp.375.000).	Direalisasikan pada Bulan November 2024
6	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pertanian	3.27.02.2.06.0003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.063.000.000	APBD Kab + Dana Insentif Fiskal Daerah	2.916.392.661	Desa Tanah Habang,Desa Cukan Lipai,Desa Lunjuk, Desa Paya, Desa Lok Besar, Desa Limbar,Desa Birayang Surapati,Desa Abung, Desa Hawang, Desa Pauh, Desa Haruyan,Desa Lok Buntar, Desa Tabat Padang	Diberikan kepada 66 orang penerima ternak itik sebanyak 50 orang dan penerima ternak domba sebanyak 16 orang	Tidak Ada	Untuk ternk domba per 1 orang mendapatkan bibit domba betina 6 ekor dan jantan 2 ekor dan 1 unit bahan kandang, untuk ternak itik per 1 orang mendapatkan 100 ekor, pakan 16 Zak dan 1 unut bahn kandang	Direalisasikan pada bulan Oktober s.d November 2024
7	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pertanian	3.27.07.2.01.02	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	231.322.000	APBD Kab	222.610.415	11Balai Penyuluhan Pertanian	Diberikan kepada 330 Petani kecil tergolong miskin dan 66 orang peternak yang ada di seluruh Kecamatan di Kab. HST.	Belum ada realisasi anggaran di tw 1 krn masih proses	Per 1 orng mendapatkan ATK, Pengganti transport, Konsumsi.	Direalisasikan pada bulan Oktober s.d Desember 2024
8	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02..2.01.0021	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	500.000.000	APBD	-	Beberapa Desa	500	Memverifikasi dan memvalidasi data individu penerima bantuan yang benar-benar tidak menerima bantuan lainnya yang sejenis agar tidak menyalahi aturan	1.000.000	Realisasi anggaran dilaksanakan padaTriwulan 3 dan 4
9	Mengurangi beban pengeluaran	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.0032	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100.000.000	APBD Kab/Kota	-	Beberapa Desa	1000	Memverifikasi dan memvalidasi data individu penerima bantuan yang benar-benar tidak menerima bantuan lainnya yang sejenis agar tidak menyalahi aturan	1.000.000	Realisasi anggaran dilaksanakan padaTriwulan 3 dan 4
10	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03.2.01.0032	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.483.739.900	APBD & DAK	1.065.869.163	Kecamatan Limpasu, Desa Alat, Desa Kayu Rabah, Ponpes An Nawawiyah	236 Sambungan Rumah	Adanya kesulitan dalam menentukan kategori kriteria masyarakat yang dimintakan dalam program PPKE ini	-	Kontrak dilaksanakan dari Bulan Juli - Desember 2024
11	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	1.03.05.2.01.0040	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	8.512.229.700	APBD & DAK	7.784.875.422	Desa Aluan, Desa Aluan Besar, Desa Bakti, Desa Kalibaru, Desa Paya, Desa Setiap.	525 Tangki Septik Individual	Adanya kesulitan dalam menentukan kategori kriteria masyarakat yang dimintakan dalam program PPKE ini	1 Tangki Septik Rp. 12.000.000	Kontrak dilaksanakan dari Bulan Juni - Desember 2024
12	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1-04.04.2-01.01	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.115.775.600	APBD Kab/Kota	7.605.306.343	Tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Diberikan Kepada 265 Unit Penerima Bantuan di 130 Desa. sebanyak 59 unit Memanfaatkan data PK3E	Tidak Ada	Rp 25.000.000	Pembangunan dilakukan pada Agustus- Desember 2024 (Melalui tahapan-tahapan pelaksanaan BRS)
13	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1-04.03.2-03.002	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.095.859.900	APBD Kab/Kota	2.015.176.394	Tersebar di Desa dan Kecamatanyang termasuk Kawasan Kumuh kewenangan Kabupaten	Diberikan Kepada 70 Unit Penerima Bantuan di 20 desa. Sebanyak 8 unit memanfaatkan data PK3E	Tidak Ada	Rp 25.000.000	Pembangunan dilakukan pada Agustus- Desember 2024 (Melalui tahapan-tahapan pelaksanaan BRS)
14	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1-04.03.2-03.006	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	4.237.159.000	APBD Kab/Kota	3.855.599.920	Tersebar di Desa dan Kecamatanyang termasuk Kawasan Kumuh kewenangan Kabupaten	Diberikan Kepada 300 Unit Penerima Bantuan di 24 Desa. sebanyak 82 unit Memanfaatkan data PK3E	Tidak Ada	Rp 10.000.000	Pembangunan dilakukan pada Agustus- Desember 2024 (Melalui tahapan-tahapan pelaksanaan Bansos Jamban dan Akses Sanitasi Layak Pedesaan)
15	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kewenangan Kabupaten.	17.056.800.000	Dana Desa/APBN	17.056.800.000	161 Desa se Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4738	Lama Proses Rilis Data dikarenakan web susah di akses	Rp 300.000	Setiap bulan (12 bulan)
16	Meningkatkan Pendapatan	Dinas penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	2.18.2.07.3.32.01.0000	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga kerja (21.07.03)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)	701.976.000	APBD Kab/Kota	516.786.075	BLK Dinas Penanaman Modal,PTSP, dan Tenaga Kerja	Sebanyak 80 (delapan puluh)orang tidak mampu mengikuti pelatihan keterampilan dibidang mengemudi kendaraan roda 4	Tidak Ada	-Kontribusi pelatihan sebesar RP 2.050.000/peserta -Praktik mengemudi roda 4 -snack -baju seragam pelatihan mengemudi -Sertifikat Pelatihan -SIM A.	26 Nov s.d 5 Des 2024 (Angkatan I) 9 Des s.d 19 Des 2024 (Angkatan II)

17	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.201.02	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	299.901.100	APBD Kab/Kota	276.186.570	11 Kecamatan di Kab. HST	Diberikan kepada masyarakat Kab. HST	Tidak Ada	semua layanan gratis	12 bulan
18	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.05.2.01.01	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	830.970.600	APBD Kab/Kota	810.755.860	11 Kecamatan di Kab. HST	Diberikan kepada masyarakat Kab. HST	Tidak Ada	semua layanan gratis	Dokumen terbit per semester
20	Mengurangi Beban Pengeluaran	BAZNAS	-	PROGRAM SAPA MUSTAHIK	Program Sapa Mustahik	6.000.000	Dana Infak	11.221.000	Barabai,Limpasu,Kasarangan,Pandawan	34	Jumlah Infak Terbatas	150,000-(Dalam Bentuk paket Logistik)	Dilaksanakan setiap bulan
21	Meningkatkan Pendapatan	BAZNAS	-	PROGRAM SAPA MUSTAHIK	Bantuan Modal Usaha	10.000.000	Dana Infak	2.900.000	Durian Gantang,Bangkal	4	Dana Terbatas	Maksimal Rp. 200.000	Tergantung Peromohonan masuk
22	Meningkatkan Pendapatan	BAZNAS	-	PROGRAM SAPA MUSTAHIK	BAZNAS Kab HST	3.000.000	Dana Zakat	3.700.000	Banua Kupang	1	Dana Terbatas	3.700.000	Satu Kali
23	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	BAZNAS	-	PROGRAM SAPA MUSTAHIK	Bantuan Program Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB)	50.000.000	Dana Infak terikat dari BAZNAS RI	50.000.000	Kasarangan dan Pandawan	2	Kurangnya tenaga Kerja	25.000.000	Satu Kali
TOTAL						**94.144.010.800**		**87.025.559.323**					